

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara

Meyka Prayanti Manginsela ⁽¹⁾, Pingkan P. Egam ⁽²⁾, Julianus A.R. Sondakh³⁾

⁽¹⁾ Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Sam Ratulangi

⁽²⁾ Staf Pengajar Prodi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi
E-mail : mevkamanginsela@gmail.com

Abstrak

Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang memiliki fungsi sangat penting bagi lingkungan, Kecamatan Wori terdapat beberapa wilayah yang memiliki hutan mangrove yaitu Desa Tiwoho, Wori, Kima Bajo, Minaesa, Budo, Darunu, Bulo, Pontoh, Lansa, Lantung, Kulu, Mantehage dan Nain. Dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Wori tersebut, Desa Tiwoho dan Desa Wori termasuk dalam kawasan konservasi yang dikelola oleh pihak Balai Taman Nasional Bunaken. Pengelolaan hutan mangrove Kecamatan Wori belum sepenuhnya berjalan dengan baik, untuk itu partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan kawasan hutan mangrove. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teori Cohen dan Uphouff dan teori Arnstein, untuk melihat seberapa jauh keterlibatan dalam bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove. Hasil menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berada pada tingkat partisipasi rendah dan tinggi yang termasuk dalam kategori terapi, penentraman, kemitraan, pendelegasian, dan kontrol masyarakat. Pengelolaan hutan mangrove diperlukan keterlibatan berbagai pihak pada bentuk perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan evaluasi untuk mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Kata-kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan, Hutan Mangrove

Abstract

Mangrove forests are an ecosystem that has a very important function for the environment. Wori District has several areas that have mangrove forests, namely the villages of Tiwoho, Wori, Kima Bajo, Minaesa, Budo, Darunu, Bulo, Pontoh, Lansa, Lantung, Kulu, Mantehage and Nain. Of the several villages in Wori District, Tiwoho Village and Wori Village are included in the conservation area managed by the Bunaken National Park Office. The management of the mangrove forests in Wori District is not yet running completely well, therefore community participation is very necessary in managing the mangrove forest areas. This research aims to determine the form of community participation in mangrove forest management and to determine the level of community participation in mangrove forest management. This research uses qualitative methods with data collection carried out through direct observation, interviews and documentation. The data obtained was then analyzed using Cohen and Uphouff's theory and Arnstein's theory, to see the extent of involvement in the form and level of community participation in mangrove forest management. The results show that community participation is at low and high levels of participation which are included in the categories of therapy, reassurance, partnership, delegation and community control. Mangrove forest management requires the involvement of various parties in the form of planning, implementation, utilization and evaluation to encourage increased community participation in mangrove forest management.

Keywords: Community Participation, Management, Mangrove Forests

Pendahuluan

Indonesia memiliki kawasan pesisir yang begitu luas dan berada di urutan keempat di dunia dengan garis pantai terpanjang. Wilayah ini merupakan tempat menumpuknya berbagai bahan buangan, baik berasal dari hulu maupun daerah setempat, akibat berbagai

macam aktivitas manusia (Robert Siburian dan John Haba, 2016:1).

Hutan mangrove merupakan suatu ekosistem yang memiliki fungsi sangat penting bagi lingkungan, salah satunya adalah sebagai peredam dari gelombang, badai angin, abrasi, perangkap sedimen, penahan lumpur yang terbawa oleh aliran air, serta sebagai penyubur tanah dan perairan. Partisipasi merupakan keterlibatan

atau ikutsertaan pada pengambilan bagian dalam sebuah diskusi yang dilakukan dengan aktif dan sengaja (Rizal dan Rahayu 2012; Suprayitnoet al 2012).

Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh dalam pengelolaan mangrove yang berkelanjutan. Pengelolaan mangrove yang dilakukan oleh masyarakat berbeda-beda disetiap wilayah sesuai dengan daerah dan masyarakatnya. Salah satu upaya masyarakat untuk melestarikan hutan mangrove adalah dengan dibuatnya kebijakan-kebijakan yang bersifat mengikat oleh pemerintah setempat, seperti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara terkait pengelolaan hutan mangrove tertera dalam Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Utara Nomor 01 tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Minahasa Utara tahun 2013-2033.

Kecamatan Wori terdapat beberapa wilayah yang memiliki hutan mangrove yaitu Desa Tiwoho, Wori, Kima Bajo, Minaesa, Budo, Darunu, Bulu, Pontoh, Lansa, Lantung, Kulu, Mantehage dan Nain. Dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Wori tersebut, Desa Tiwoho dan Desa Wori termasuk dalam kawasan konservasi yang dikelola oleh pihak Balai Taman Nasional Bunaken. Pengelolaan hutan mangrove yang ada di kecamatan Wori perlu adanya perhatian dari pemerintah dengan mengadakan program-program pengelolaan hutan mangrove dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Wori.

Beberapa penelitian yang berhubungan dengan hutan mangrove di Kecamatan Wori sebelumnya telah dilakukan oleh Tidore dkk.,(2019), Awali dkk.,(2023), Demotekay ddk., (2022), Upara dkk.,(2021). Penelitian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Wori ini diharapkan agar dapat memberikan informasi tentang pengelolaan hutan mangrove dengan adanya partisipasi dari masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat adalah suatu keterlibatan dari masyarakat dalam suatu kegiatan atau program. Inisiatif ataupun tindakan berasal dari dalam masyarakat ataupun diluar masyarakat. Menurut Mardikanto (2015) mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah suatu program yang berkaitan dengan aspek sosial, budaya, serta ekonomi. Tanpa adanya peran aktif dari masyarakat itu sendiri, tentunya program-program

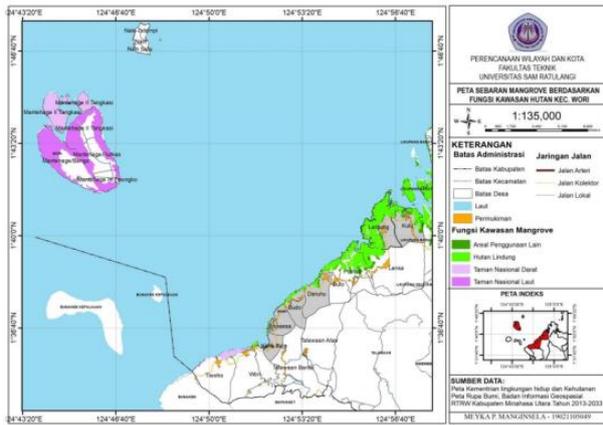
kegiatan tersebut tidak dapat tercapai, baik secara objek maupun subjek dalam kegiatan.

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat menurut Cohen dan Uphouff dalam Dwiningrum (2015) membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu: 1) Partisipasi dalam perencanaan. 2) Partisipasi dalam pelaksanaan. 3) Partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. 4) Partisipasi dalam evaluasi.

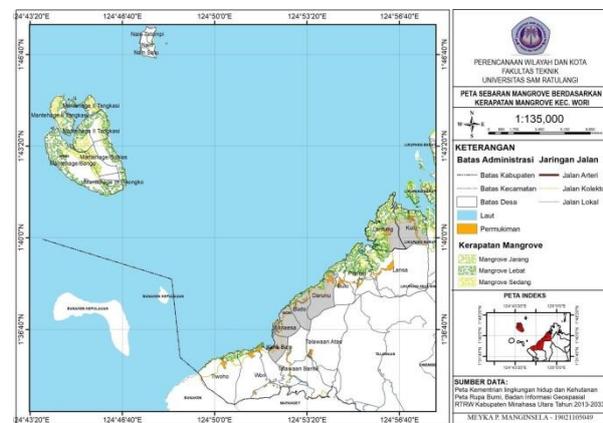
Tingkat partisipasi masyarakat menurut Sherry Arnstein dalam (Dzulkhijiana Atika, 2015) menjelaskan bahwa, model partisipasi masyarakat yang terbagi dalam delapan tangga partisipasi, yaitu: 1) Manipulasi (*Manipulation*), masyarakat tidak terlibat dan tidak mengetahui manfaatnya. 2) Terapi (*Therapy*), sekedar hanya untuk masyarakat tahu, namun tidak terlibat. 3) Informasi (*Informing*), pemerintah desa menyampaikan informasi terkait pengelolaan dan masyarakat hanya sekedar menerima informasi. 4) Konsultasi, masyarakat diberikan kesempatan dalam menyampaikan tanggapan saran, namun keputusan berada pada pemerintah. 5) Penentruman (*Consultation*), masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh namun masih ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan /pemerintah. 6) Kemitraan (*Partnership*), masyarakat memiliki kesepakatan bersama antara pemerintah dan adanya kerja sama dalam melaksanakan pengelolaan. 7) Pendelegasian (*Delegated power*), masyarakat memiliki peran dalam melaksanakan program pengelolaan di desa lebih besar dari pada pemerintah yang ada, serta diberikan kewenangan dalam mengambil keputusan. 8) Kontrol masyarakat (*Citizen Control*), masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan di desa, memiliki kendali penuh serta mampu tanpa melibatkan pemerintah desa.

Pengelolaan Hutan Mangrove

Raharjo (1996) menjelaskan pengelolaan berbasis masyarakat juga mengandung arti suatu pendekatan dengan membiarkan masyarakat sendiri mengelola dan mengusulkan. Diharapkan apa yang menjadi kebutuhannya, keprihatinan, dan aspirasinya dapat tertampung. Karakteristik kawasan hutan mangrove yang ada di Kecamatan Wori memiliki dua fungsi yaitu, hutan konservasi dan hutan lindung. Hutan konservasi sendiri berada di Desa Tiwoho, Wori, Mantehage dan Nain. Dengan luas keseluruhan kurang lebih 46.401 hektar. Hutan lindung berada di Desa Kima Bajo, Minaesa, Budo, Darunu, Bulu, Ponto, Lansa, dan Kulu. Berikut merupakan peta sebaran mangrove berdasarkan fungsi kawasan hutan dan peta berdasarkan kerapatan mangrove, seperti yang terlihat pada gambar 1 dan gambar 2.



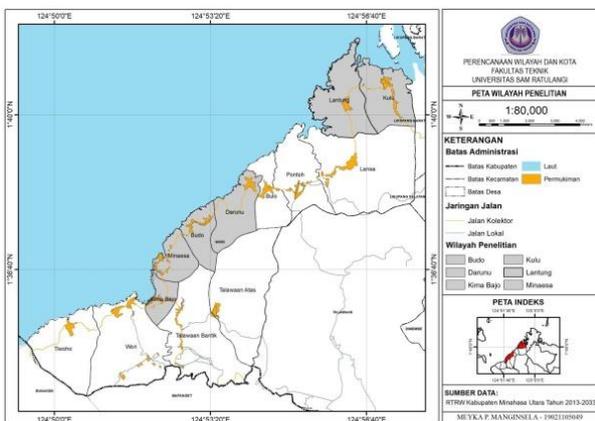
Gambar 1. Peta Sebaran Mangrove Berdasarkan Fungsi Kawasan Hutan
Sumber: Penulis, 2023



Gambar 2. Peta Sebaran Mangrove Berdasarkan Kerapatan Mangrove
Sumber: Penulis, 2023

Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Fokus wilayah, yaitu permukiman yang berada di kawasan pesisir hutan mangrove yang memiliki potensi dalam pengelolaan hutan mangrove, yaitu Desa Kima Bajo, Minaesa, Budo, Darunu, Lantung, dan Kulu, bisa dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Peta Lokasi Penelitian
Sumber: Penulis 2023

Pengumpulan data

Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung dilapangan dengan teknik wawancara langsung kepada masyarakat yang berdomisili di sekitar kawasan pesisir hutan mangrove dan melakukan dokumentasi lokasi yang diteliti untuk melihat fakta-fakta kondisi hutan mangrove serta partisipasi masyarakat yang ada. Pengumpulan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari instansi pemerintah (kantor kecamatan dan balai desa).

Variabel yang dibahas yaitu bentuk partisipasi masyarakat yang terdiri dari 4(empat) variabel berdasarkan dari teori Cohen dan Uphouff, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dengan menggunakan delapan tingkat partisipasi, yaitu manipulasi, terapi, informasi, konsultasi, penetrasi, kemitraan, pendelegasian dan kontrol masyarakat, seperti dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian

No	Variabel	Indikator/Parameter
1	Partiispasi masyarakat dalam perencanaan	Keterlibatan dan pengetahuan masyarakat dalam bentuk
		<ul style="list-style-type: none"> - Usulan atau saran - Diskusi - Kehadiran rapat atau sosialisasi
2	Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan	Keterlibatan masyarakat dalam bentuk tenaga dan keahlian seperti:
		<ul style="list-style-type: none"> - Pengumpulan buah mangrove - Persiapan lahan dengan kondisi tanah yang cocok, ketersediaan air serta luas lahan. - Penyediaan bibit dan penyemaian - Pembuatan ajir - Penanaman bibit
3	Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan	Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemanfaatan materil maupun sosial
		<ul style="list-style-type: none"> - Penulaman - Potensi ekowisata - Potensi ekonomi
4	Partisipasi masyarakat dalam evaluasi	Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pengawasan
		<ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan - Evaluasi hasil pengelolaan yang dilaksanakan

Sumber: Penulis, 2023

Metode Analisis Data

Analisis data yang dijabarkan melalui analisis deskriptif, dengan mengolah data yang diperoleh berdasarkan indikator dari variabel penelitian untuk mengetahui bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan hutan mangrove berdasarkan kondisi yang ada di masing- masing lokasi penelitian.

Analisis dan Interpretasi

Penelitian pada enam wilayah di Kecamatan Wori khususnya yang berada pada kawasan hutan mangrove, dimana persebaran permukiman yang cukup padat dan memiliki tingkat kerawanan terhadap wilayah pesisir sangat tinggi bagi penduduk yang ada. Oleh sebab itu kawasan hutan mangrove sangat penting bagi masyarakat daerah pesisir dan perlu adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Pembahasan

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove dari enam desa wilayah penelitian dapat dilihat dalam penjelasan masing- masing desa berikut ini.

Desa Kima Bajo

Desa Kima Bajo memiliki potensi manfaat hutan mangrove, yaitu hasil pembuatan bibit mangrove sehingga mendapatkan nilai ekonomi bagi masyarakat khususnya bagi kelompok yang ada. Pengelolaan hutan mangrove yang ada dilakukan oleh masyarakat setempat dengan adanya kelompok khusus pengelolaan hutan mangrove. Kegiatan pengelolaan yang dimaksud ialah melakukan tahap-tahap pengelolaan yang baik, mulai dari memberi arahan sampai pada pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove. Berikut merupakan dokumentasi kawasan hutan mangrove desa Kima Bajo, seperti dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 4. Kawasan hutan mangrove Desa Kima Bajo
Sumber: Observasi Peneliti, 2023

Desa Minaesa

Desa Minaesa masih kurang adanya kawasan mangrove yang diakibatkan oleh kondisi tanah pesisir yang tidak cocok sehingga bibit mangrove yang ditanam tidak dapat bertumbuh. Kegiatan partisipasi dari masyarakat setempat masih dikatakan kurang baik, karena kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan kurangnya pengetahuan atau informasi terkait pengelolaan hutan mangrove yang diberikan dari pemerintah setempat maupun pihak-pihak terkait. Berikut merupakan dokumentasi kawasan hutan mangrove Desa Minaesa, seperti pada gambar 5.



Gambar 5. Kawasan hutan mangrove Desa Minaesa
Sumber : Observasi Peneliti, 2023

Desa Budo

Desa Budo memiliki potensi manfaat hutan mangrove, yaitu menjadikan kawasan hutan mangrove sebagai kawasan pariwisata dan pendidikan. Berikut merupakan dokumentasi kawasan hutan mangrove desa Budo, seperti pada gambar 6.



Gambar 6. Kawasan hutan mangrove Desa Budo
Sumber: Observasi Peneliti, 2023

Desa Darunu

Desa Darunu memiliki potensi manfaat hutan mangrove, yaitu hasil pembuatan bibit mangrove dan menjadikan kawasan pariwisata hutan mangrove dan pendidikan, sehingga mendapatkan nilai ekonomi bagi masyarakat dan kelompok yang ada. Berikut merupakan dokumentasi kawasan hutan mangrove desa Darunu, seperti pada gambar 7.



Gambar 7. Kawasan hutan mangrove Desa Darunu
Sumber: Observasi Peneliti, 2023

Desa Lantung

Desa Lantung memiliki potensi manfaat hutan mangrove, yaitu hutan mangrove yang ada merupakan wilayah

kawasan hutan mangrove yang paling padat di Kecamatan Wori. Masyarakat yang ada dapat memanfaatkan pohon mangrove yang sudah kering untuk dijadikan kayu bakar, cobekan dan tentunya melalui ijin dari pihak tertentu seperti pemerintah setempat. Berikut merupakan dokumentasi kawasan hutan mangrove desa Lantung, seperti pada gambar 8.



Gambar 8. Kawasan hutan mangrove Desa Lantung
Sumber: Observasi Peneliti, 2023

Desa Kulu

Desa Kulu memiliki potensi manfaat hutan mangrove, yang cukup baik dimana desa ini sebagian besar masyarakat berada atau tinggal di pesisir. Kondisi hutan mangrove yang ada masih terjaga dan dilindungi, karena masyarakat desa sadar akan pentingnya hutan mangrove bagi lingkungan. Berikut merupakan dokumentasi kawasan hutan mangrove desa Kulu, seperti dilihat pada gambar 9.



Gambar 9. Kawasan hutan mangrove Desa Kulu
Sumber: Observasi Peneliti, 2023

Dari hasil wawancara dan observasi wilayah mangrove dimana dari enam desa, terdapat masyarakat yang sudah terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove dan ada yang belum atau tidak terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove. Pengelolaan hutan mangrove yang

dimaksud seperti adanya kelompok pengelolaan serta kegiatan-kegiatan partisipasi masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove.

Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat, yaitu untuk melihat keterlibatan partisipasi masyarakat apakah masyarakat sudah mengerti dan berpartisipasi terhadap pengelolaan hutan mangrove atau masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove yang ada di lokasi penelitian ini.

Perencanaan

Keterlibatan dan pengetahuan masyarakat dalam bentuk ide, saran, masukan, diskusi, serta terlibat hadir dalam kegiatan sosialisasi, rapat dan pertemuan. Hasil analisis dari perencanaan, yaitu terdapat satu desa yang tidak terlibat dalam perencanaan pengelolaan hutan mangrove, mulai dari menghadiri kegiatan sosialisasi, memberikan masukan, ide dan saran, yaitu partisipasi masyarakat yang berada di desa Minaesa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan, merupakan rencana program atau kegiatan yang akan dilakukan tentang pengelolaan hutan mangrove, maka dari itu perlu adanya keterlibatan masyarakat agar apa yang menjadi keputusan bersama pemerintah dapat meneruskan kepada pihak terkait kawasan hutan mangrove.

Pelaksanaan

Keterlibatan masyarakat dalam bentuk keahlian seperti, melakukan proses pengelolaan mangrove, mulai dari penyiapan lahan, persiapan alat dan bahan dalam pembuatan bibit mangrove, pengumpulan buat mangrove, sampai pada penanaman bibit. Hasil analisis dari pelaksanaan, yaitu terdapat satu desa yang tidak terlibat aktif dalam pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove partisipasi masyarakat yang berada di desa Minaesa. Dalam tahap pengelolaan yang dimaksud merupakan persiapan lahan pembibitan, penyediaan alat dan bahan yang diperlukan dalam proses pembibitan seperti, polybag, ajir, bibit, lumpur, dan alat lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengelolaan.

Pemanfaatan

Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pemanfaatan materi maupun sosial, yaitu penyulaman, menjadikan hutan mangrove yang ada sebagai sumber ekonomi, serta potensi wisata, terdapat satu desa yang tidak merasakan manfaat dari adanya mangrove, yaitu Desa Minaesa. Desa yang merasakan dan menikmati dari adanya pengelolaan hutan mangrove, yaitu Desa Kima Bajo, masyarakat mendapatkan sumber penghasilan tambahan dengan menjual bibit mangrove. Desa Budo dan Desa Darunu menjadi potensi tempat wisata yang maju dan terkenal. Dengan adanya hutan mangrove masyarakat dapat merasakan manfaat yang ada, mulai

dari manfaat alam seperti terlindungi dari ancaman badai angin laut, erosi, dan lainnya.

Evaluasi

Keterlibatan masyarakat dalam bentuk pengawasa, yaitu mulai dari pemeliharaan, sampai evaluasi hasil pengelolaan yang telah dilaksanakan apakah berhasil atau tidak, terdapat satu desa yang tidak terlibat, yaitu Desa Minaesa. Lima desa lainnya, Desa Kima Bajo, Budo, Darunu, Lantung, dan Kulu terlibat dalam bentuk pengawasan serta mengevaluasi hasil pengelolaan hutan mangrove.

Berdasarkan hasil analisis bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan variabel dalam penelitian, didapatkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang ada di wilayah penelitian khususnya lima desa di antaranya Desa Kima Bajo, Budo, Darunu, Lantung dan Kulu sudah tergolong baik. Artinya masyarakat yang ada terlibat aktif dalam segala bentuk pengelolaan baik secara pribadi maupun kegiatan atau program pemerintah, seperti dijelaskan pada tabel 2.

Tabel 2. Analisis Bentuk Partisipasi

No	Desa	Perencanaan		Pelaksanaan		Pemanfaatan		Evaluasi	
		Terlibat	Tidak terlibat	Terlibat	Tidak terlibat	Terlibat	Tidak terlibat	Terlibat	Tidak terlibat
1	Kima bajo	✓		✓					
2	Minaesa		✓		✓		✓		✓
3	Budo	✓		✓			✓		✓
4	Darunu	✓		✓			✓		✓
5	Lantung	✓		✓			✓		✓
6	Kulu	✓		✓			✓		✓

Sumber: Penulis, 2023

Tingkat Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat ini yaitu untuk melihat dan mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat apakah tergolong dalam tingkatan tangga partisipasi rendah, sedang dan tinggi. Berikut merupakan klasifikasi tingkat partisipasi berdasarkan teori Sherry Arnstein, seperti dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Tingkat Partisipasi

No	Tingkatan	Klasifikasi Tingkat
1	Rendah	Manipulasi
		Terapi
2	Sedang	Informasi
		Konsultasi
		Penentraman
3	Tinggi	Kemitraan
		Pendelegasian
		Kontrol Masyarakat

Sumber: Arnstein, 1969

Berdasarkan klasifikasi tingkat partisipasi di atas maka dijabarkan dalam tabel berikut berdasarkan kriteria tingkat partisipasi, bisa dilihat pada tabel 4.

Tabel 4. Kriteria Tingkat Partisipasi

No	Tingkatan	Kategori Tingkat Partisipasi	Kriteria
1	Rendah	Manipulasi	Masyarakat tidak terlibat dan tidak mengetahui manfaatnya.
		Terapi	Sekedar hanya untuk masyarakat tahu, namun tidak terlibat.
3		Pemberian Informasi	Pemerintah desa menyampaikan informasi terkait pengelolaan dan masyarakat hanya sekedar menerima informasi.
		Konsultasi	Masyarakat diberikan kesempatan dalam menyampaikan tanggapan saran , namun keputusan berada pada pemerintah,
5		Penentraman	Masyarakat mulai mempunyai beberapa pengaruh namun masih ditentukan oleh pihak yang mempunyai kekuasaan/pemerintah
		Kemitraan	Masyarakat memiliki kesepakatan bersama antara pemerintah dan adanya kerja sama dalam melaksanakan pengelolaan
7	Tinggi	Pendelegasian	Masyarakat memiliki peran dalam melaksanakan program pengelolaan di desa lebih besar dari pada pemerintah yang ada serta diberikan kewenangan dalam mengambil keputusan.
		Kontrol Masyarakat	Masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan di desa, memiliki kendali penuh serta mampu tanpa melibatkan pemerintah desa.

Sumber: Penulis, 2023

Untuk mengetahui tingkat partisipasi dari masing-masing desa wilayah penelitian, maka dijabarkan dalam tabel analisis tingkat partisipasi dengan keterangan sebagai berikut: Tingkat Rendah (I) Manipulasi, (II) Terapi. Tingkat Sedang: (III) Pemberian Informasi, (IV) Konsultas, (V) Penentraman. Tingkat Tinggi: (VI)

Kemitraan, (VII) Pendelegasian, (VIII) Kontrol Masyarakat.

Tabel 5. Analisis Tingkat Partisipasi

No	Desa	Variabel	Tingkat Partisipasi							
			Rendah	Sedang	Tinggi					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
1	Kima Bajo	Perencanaan					✓			
		Pelaksanaan						✓		
		Pemanfaatan						✓		
		Evaluasi							✓	
2	Minaesa	Perencanaan			✓					
		Pelaksanaan		✓						
		Pemanfaatan		✓						
		Evaluasi			✓					
3	Budo	Perencanaan					✓			
		Pelaksanaan						✓		
		Pemanfaatan							✓	
		Evaluasi								✓
4	Darunu	Perencanaan					✓			
		Pelaksanaan						✓		
		Pemanfaatan							✓	
		Evaluasi								✓
5	Lantung	Perencanaan					✓			
		Pelaksanaan						✓		
		Pemanfaatan							✓	
		Evaluasi								✓
6	Kulu	Perencanaan			✓					
		Pelaksanaan			✓					
		Pemanfaatan							✓	
		Evaluasi								✓

Sumber : Penulis, 2023

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel di atas, terdapat satu tingkat partisipasi rendah (terapi), dimana masyarakat tidak terlibat dan tidak mengetahui manfaatnya, yaitu partisipasi masyarakat yang ada di Desa Minaesa. Alasan utama bagi masyarakat yang tidak terlibat dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan mangrove adalah mereka mengutamakan pekerjaan pribadi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu minimnya informasi serta keterlibatan masyarakat dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak-pihak terkait. Perlu adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri dan kepedulian dari pemerintah agar dapat melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan pengelolaan hutan mangrove. Untuk Desa Kima Bajo, Budo, Darunu, Lantung dan Kulu, partisipasi masyarakat sudah terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove dengan hasil tingkatan sedang-tinggi. Artinya masyarakat yang ada melibatkan diri secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan hutan mangrove yang ada. Dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat menunjukkan sebagian besar dalam kategori tingkat tinggi, sehingga memberikan pengaruh positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis maka diperoleh kesimpulan bahwa bentuk

partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hutan mangrove terdapat lima desa yaitu: Desa Kima Bajo, Budo, Darunu, Lantung dan Kulu), partisipasi masyarakat sudah terlibat aktif dalam pengelolaan hutan mangrove. Sementara itu di Desa Minaesa masih kurang karena masyarakat tidak terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Minaesa masuk dalam kategori rendah (terapi). Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pengelolaan hutan mangrove, kurang dalam pembuatan bibit maupun menanam bibit mangrove yang disebabkan oleh kondisi pesisir yang tidak memungkinkan sehingga mangrove susah untuk bertumbuh. Desa Kima Bajo, Budo, Darunu, Lantung, dan Kulu sudah termasuk kedalam kategori tingkat partisipasi sedang sampai tingkat partisipasi tinggi. Masyarakat terlibat dalam pengelolaan hutan mangrove.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Universitas Sam Ratulangi, kedua dosen pembimbing skripsi, orang tua, pemerintah dan masyarakat Kecamatan Wori yang ada di lokasi penelitian atas segala bantuan selama penelitian.

Daftar Pustaka

- Alfandi. D., Qurniati. R., Febryano. I.G., 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Mangrove*. Jurnal Sylva Lestari Vol.7, No.1
- Arnstein, S. 1969. *A Ladder Participation*. Jurnal American Institute of Planners, 35(40), 216-224
- Awali, K. R., Saroinsong, F.B., Kalitouw, D. W., 2023. *Penilaian Manfaat Ekowisata Hutan Mangrove Desa Budo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Agri-Sosioekonomi Vol. 19, No. 1, 605-616
- BPS Kecamatan Wori Dalam angka. 2021. Diakses pada 1 November 2022.
- Cohen and Uphoff. 1997. *Rural Development Participation*. New York: Cornel University.
- Demotekay, P.G., Pakasi. C.B.D., Tangkere, E.G. 2022. *Presepsi Masyarakat Terhadap Wisata Hutan Mangrove Di Desa Budo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Ilmiah Agrisosioekonomi Vol 18, No.2
- Egam, P.,P., Rengkung. M. 2017. *Analisis Visual Kawasan Pesisir Pantai (Studi Kasus Permukiman masyarakat LOS di pesisir Pantai Malalayang)*. Jurnal Arsitektur Daseng, 6(1),21-31
- Junus, A., Syafriny, R., Egam, P., 2021. *Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Objek Wisata Di Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Spasial Vol 8. No. 3, 2021. Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi . Manado
- Rizal M., dan Rahayu SP. 2015. *Tingkat Partisipasi Petani dalam Kelompok Tani Padi Sawah untuk*

- Mendukung Program M-P3MI di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur*. Prosiding, 1(2), 352-357
- Siburian, Robert, Jhon Haba. 2016. *Konservasi Mangrove Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirman Rahim & Dewi Wahyuni K. Badera. 2017. *Hutan Mangrove dan Pemanfaatannya*. Deepublish
- Sumarandak, M., Tungka, A., Egam, P.,P., 2021, *Persepsi Masyarakat Terhadap Kawasan Monumen di Manado*. Jurnal Spasial 8(2), 255-268
- Tidore S., dkk., 2021. *Struktur Komunitas Hutan Mangrove di Desa Budo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis Vol. 9, No. 2
- Upa U., dkk. 2021. *Struktur Komunitas Dan Zonasi Vegetasi Mangrove Desa Darunu Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara*. Jurnal Pesisir dan Laut Tropis Vol. 9, No. 1
-